

INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM RANGKA PENANAMAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

Cut Intan Hayati¹, Herawati²

¹IAIN Lhokseumawe, Jalam Medan – Banda Aceh, Buket Rata, Lhokseumawe

²Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala,
Banda Aceh

Korespondensi Penulis: herawati@uui.ac.id, cutintanhayati@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Inovasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan sistem pendidikan Islam. Di tengah-tengah pesatnya inovasi Pendidikan dalam konteks pengembangan kurikulum, sering kali para guru PAI merasa kebingungan dalam menghadapinya. Dan inovasi pendidikan tersebut cenderung bersifat *top-down innovation* dengan strategi *power coercive* atau strategi pemaksaan dari atasan (pusat) yang berkuasa. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi serta efektivitas pelaksanaan Pembelajaran PAI. Namun demikian, hendaknya kurikulum Pendidikan Agama Islam seyogyanya mencakup segala dimensi termasuk dalam bersikap dan bertindak sehingga kurikulum Pendidikan Agama Islam harus terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya termasuk terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Penelitian ini merupakan penelitian tinjauan Pustaka (*literature review*) dengan mengumpulkan data-data maupun sumber yang berkaitan dengan satu topik tertentu yang mana informasi ini dapat dari jurnal, laporan penelitian, buku, *e-book*, sumber Pustaka lainnya. Hasil pelaksanaan penelitian ini membuktikan bahwa kebudayaan lokal dapat dijadikan sebagai khazanah lokal dalam kurikulum pembelajaran PAI yang mampu mengeliminir Pendidikan Agama dalam pembelajaran di sekolah dan sebagai upaya mengeliminir gagap budaya pada para peserta didik, sehingga mereka mencari kompensasi pada budaya lain yang dalam banyak hal memiliki resistensi terhadap nilai-nilai agama. Muatan lokal dalam kurikulum berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah sebagai upaya meningkatkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Kata kunci: Inovasi Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Nilai-nilai Kerarifan Lokal.

Islamic Religious Education Curriculum (PAI) Innovation in the Framework of Installing Local Wisdom Values

Abstrak

Islamic Religious Education (PAI) curriculum innovation is one manifestation of the development of the Islamic education system. In the midst of the rapid pace of educational innovation in the context of curriculum development, PAI teachers often feel confused about dealing with it. And these educational innovations tend to be top-down innovation with coercive power strategies or coercive strategies from the ruling (central) superiors. Innovation aims to improve the quality, efficiency and effectiveness of implementing PAI learning. However, the Islamic Religious Education curriculum should cover all dimensions including attitudes and actions so that the Islamic Religious Education curriculum must be integrated with various other disciplines including integrated with local wisdom values. This research is a literature review research by collecting data and sources related to a particular topic where this information can be obtained from journals, research reports, books, e-books, other library sources. The results of the implementation of this research prove that local culture can be used as local treasures in the PAI learning curriculum which is able to eliminate religious education in learning at school and as an effort to eliminate cultural stuttering in students, so that they seek compensation in other cultures which in many ways have resistance. to religious values. Local content in the curriculum is based on Regulation of the Minister of Religion Number 2 of 2008 concerning Content Standards and Competency Standards for Graduates of Islamic Religious Education and Arabic in Madrasas as an effort to improve Competency Standards and Basic Competences.

Keywords: Curriculum Innovation, Islamic Religious Education, Local Wisdom Values.

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan elemen penting dalam pendidikan, sehingga pembicaraan mengenai kurikulum menjadi salah satu permasalahan yang hangat untuk dibicarakan, mengingat kurikulum merupakan peranan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, bahkan dapat dikatakan bahwa kurikulum memegang kedudukan sebagai kunci suksesnya pendidikan. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan penentuan arah, isi, proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga. Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah, maupun nasional (Nana Syaodih, 2006).

Semua orang memiliki kepentingan dengan kurikulum, dimana sebagai orang tua,

warga masyarakat, pemimpin formal ataupun informal selalu mengharapkan tumbuh dan berkembangnya anak, pemuda, dan generasi muda yang lebih baik, cerdas dan memiliki kemampuan. Kurikulum memiliki andil yang cukup besar dalam melahirkan harapan tersebut. kurikulum juga sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan peserta didik nantinya, maka pengembangan kurikulum tidak dapat dikerjakan sembarangan (Sofian Amri dan Iif Khoiru Ahmadi, 2009). Melainkan harus berorientasi pada tujuan yang jelas sehingga akan menghasilkan hasil yang baik dan sempurna.

Disamping itu, program pendidikan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dan akan terjadi. Oleh karena itu, kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama-sama masyarakat pemakai. Dan untuk bisa merancang kurikulum yang demikian, guru harus memiliki peranan yang sentral. Karenanya kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru disamping kompetensi teori belajar.

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang atau terkandung dalam visi, misi, tujuan, program kegiatan maupun praktik pelaksanaan pendidikannya. Inovasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan sistem pendidikan Islam (Muhaimin, 2005).

Di tengah-tengah pesatnya inovasi pendidikan, terutama dalam konteks pengembangan kurikulum, sering kali para guru PAI merasa kebingungan dalam menghadapinya. Apalagi inovasi pendidikan tersebut cenderung bersifat *top-down innovation* dengan strategi *power coercive* atau strategi pemaksaan dari atasan (pusat) yang berkuasa. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam ataupun untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan PAI dan sebagainya. Namun demikian, hendaknya kurikulum Pendidikan Agama Islam seyogyanya mencakup segala dimensi termasuk dalam bersikap dan bertindak sehingga kurikulum Pendidikan Agama Islam harus terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya

termasuk terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat.

Sementara kearifan lokal atau yang disebut sebagai kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah dan semboyan hidup (Nasiwan dkk, 2012). Kehidupan yang sesuai dengan kearifan lokal memungkinkan masyarakat hidup secara bahagia dan keteraturan dengan memiliki nilai-nilai yang luhur. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya.

Namun sangat disayangkan, di era milenial ini nilai-nilai kearifan lokal sudah mulai memudar dalam masyarakat ditandai dengan terjadinya dekadensi moral yang melanda generasi muda dan masyarakat. Karenanya dibutuhkan perhatian dari segenap elemen dari pemerintah hingga masyarakat untuk membenahi permasalahan ini, salah satunya dengan melakukan inovasi kurikulum PAI baik dilingkungan belajar yang formal, nonformal dan informal.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian ini menggunakan desain tinjauan Pustaka (*literature review*) dengan mengumpulkan data-data maupun sumber yang berkaitan dengan satu topik tertentu yang mana informasi ini dapat dari jurnal, laporan penelitian, buku, *e-book*, sumber Pustaka lainnya (Zed, 1999). Peneliti memanfaatkan mesin pencarian (*search engine*) seperti:

google scholar, iPusnas, hingga *researchgate*. Seluruh sumber yang sudah dianalisis oleh penulis kemudian disintesis sebagai bagian dari sintesis data. Sintesis data adalah gagasan yang berupa data fakta, atau informasi ide pokok yang disajikan oleh peneliti sehingga peneliti menggunakan sintesis data penelitian tinjauan Pustaka. (Synder, 2019). Sintesis data penelitian adalah metode deskripsi yang digunakan untuk mengolah dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian atau literatur dengan cara mensintesis atau merangkum data, mengkritik, maupun menyimpulkan informasi sesuai dengan kata kunci. (Neuman, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian inovasi kurikulum PAI

Menurut Schempeter inovasi berarti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi kombinasi sehingga dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dan produk, pelayanan, proses kerja dan kebijakan tidak hanya bagi lembaga pendidikan tapi juga stakeholder dan masyarakat. sementara Wina Sanjaya mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan (Wina Sanjaya, 2008).

Secara bahasa inovasi berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat diartikan sebagai penemuan, namun memiliki makna yang berbeda dengan penemuan dalam arti *discovery* atau *invention*. *Discovery* memiliki makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya misalnya penggunaan model pembelajaran PAI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Di Indonesia

baru-baru ini dikembangkan meskipun sebenarnya model pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di negara-negara lainnya. Sementara *invention* memiliki arti sebagai penemuan yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya.

Dengan demikian, pengertian inovasi adalah sebagai wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Jika dilihat dari maknanya sesuatu yang baru itu benar-benar baru belum tercipta sebelumnya yang disebut *invention* dan ada juga yang tidak benar-benar baru karena sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang berbeda (*discovery*). Jadi inovasi bisa terjadi dalam segala bidang termasuk dalam pendidikan dimana inovasi dilakukan dimana saja dan kapan saja. Khususnya dalam bidang pendidikan, inovasi muncul dari adanya keresahan dan keingintahuan dari pihak-pihak tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya keresahan akan kompetensi guru, proses pembelajaran yang dianggap kurang berhasil, keresahan pihak administrator pendidikan tentang kinerja guru, atau keresahan masyarakat terhadap kinerja dan hasil, bahkan sistem pendidikan. Keresahan tersebut pada akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera.

Upaya untuk memecahkan masalah tersebut memunculkan ide-ide baru atau gagasan sbagaiinovasi begitu juga dengan kemajuan guru dan administrator sekolah akan adanya sekolah yang lebih maju dan bermutu, sehingga menarik minat masyarakat untuk memilihnya sebagai tujuan anaknya bersekolah. Dengan demikian dapat dikatakan inovasi akan ada karena adanya masalah yang dirasakan, hampir tidak mungkin inovasi akan muncul tanpa adanya masalah.

Perbaikan kurikulum merupakan upaya perbaikan pada bidang pendidikan dimana kurikulum sebaiknya melihat kepentingan masa depan serta menekankan

kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktis salah satu memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan (Oemar Hamalik, 2007).

Pengertian kearifan lokal

Kearifan (*wisdom*) adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan makna sebagai ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

Kearifan lokal dapat dijelaskan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau keajangan dalam suatu daerah. Kearifan lokal juga dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan N.A, 2007). Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat setempat atau kebudayaan masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap alam dan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat menggunakan cara-cara tersendiri untuk mengelola alam dan lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan itu kemudian membentuk dengan dengan apa yang disebut dengan kearifan lokal dimana kearifan lokal mengandung nilai, kepercayaan dan sistem religi yang dianut oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal pada intinya kegiatan yang melindungi dan melestarikan alam dan lingkungan. Karenanya penting untuk mengkaji dan melestarikan kerifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Namun seiring berjalannya waktu keberadaan kearifan lokal semakin tersingkirkan dengan masuknya berbagai teknologi dan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat seperti penambahan penduduk yang semakin meningkat. Keadaan demikian membuat masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang telah diturunkan secara turun-temurun. Pola pikir masyarakat mulai berubah seiring dengan mudarnya kearifan lokal yakni dari pola pikir holistik ke pola pikir mekanik. Masyarakat tidak lagi memikirkan keseimbangan alam dan lingkungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan. Prospek kearifan lokal sangat bergantung kepada bagaimana masyarakat melestarikan kembali kearifan lokal yang ada dan bagaimana masyarakat mengubah pola pikirnya kembali ke pola pikir holistik. Sehingga sumberdaya alam dan lingkungan alam yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dan dilestarikan dengan tanpa mengganggu keseimbangannya.

Kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkeberkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat local (Suhartini, 2009).

Problem Empirik Pendidikan Agama Islam

Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi polemik yang sampai saat ini belum dapat

diselesaikan dengan baik, “Pendidikan Agama Islam masih dalam tataran teoritik dimana dapat dilihat pada rumusan sebagai berikut: “Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dari/ latihan. Secara praksis, PAI adalah mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama Islam. Ia merupakan rumpun mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik” (Departemen Agama RI, 2005).

Sementara Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah terdiri dari empat mata pelajaran yakni: Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling berkaitan, isi mengisi dan saling melengkapi. Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti ia merupakan sumber akidah/ akhlak, syariah/ fikih (ibadah dan muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Akidah (Ushuluddin) atau keimanan akar atau pokok agama. Syariah/ fikih (ibadah dan muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syariah/ fikih adalah sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dengan makhluk lainnya. Sementara Akhlak merupakan aspek sikap atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti luas) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah) itu menjadi sikap hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan

kekeluargaan, kebudayaan/ seni, iptek, olahraga/ kesehatan, dan sebagainya) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah (Peraturan Menteri RI, 2008).

Tidak ada yang salah dari rumusan-rumusan tersebut, karena dalam dataran teoretik Pendidikan Agama Islam senantiasa menunjukkan dirinya dalam rumusan-rumusan ideal sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran agama, nilai-nilai luhur falsafah bangsa dan nilai-nilai luhur masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam realitasnya, tidak sedikit Pendidikan Agama Islam menampakkan wajahnya yang jauh dari rumusan-rumusan ideal tersebut. Realitas dimaksud setidaknya menampakkan wajah sebagai berikut. *Pertama*, *Scope* dan *Sequence* yang minimalis dalam kurikulum sekolah dan Madrasah. Dalam rumusan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) diberikan porsi 2 jam perminggu. Meski begitu kita cukup berbesar hati dengan kemunculan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah sebagai upaya meningkatkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Kedua, PAI sebagai Pendidikan agama tidak menjadi salah satu Ujian Akhir Nasional meskipun menjadi salah satu syarat penentuan kelulusan sekolah. Tingkat keberhasilan siswa dalam jenjang pendidikan yang ditempuh diukur dari seberapa mampu siswa mengerjakan soal-soal ujian yang disusun oleh Depdiknas yang mencakup beberapa mata pelajaran; Bahasa Indonesia, Matematika dan bahasa Inggris dan IPA, dengan skala 5,5.

Ketiga, Kritik kurang profesionalnya guru-guru PAI. Ada banyak gugatan tentang profesionalisme guru PAI. Jika mengacu UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu sosial, personal, profesional dan pedagogis. Salah satu kritik tersebut adalah adanya sinyalemen sebagaimana dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, bahwa, "Sekian guru tidak layak mengajar".

Keempat, Kritik kurang kredibelnya lembaga produsen calon guru PAI. Salah satu lembaga produsen guru Pendidikan Agama Islam adalah Fakultas Tarbiyah. Meski begitu, ada sejumlah mahasiswa non tarbiyah yang menjadi guru karena mengambil akta IV. Atau sejumlah tenaga administratif yang karena sudah mengikuti pendidikan D2 (Ahli Muda) dan D3 (Ahli Madya) Pendidikan Agama Islam kemudian beralih profesi sebagai guru. Disamping itu tidak dipungkiri bahwa ada sejumlah Lembaga pendidikan tinggi yang membuka program-program sertifikasi guru. Akan tetapi tidak seluruh lembaga produsen guru tersebut dikelola secara akademik. Pada gilirannya, situasi ini semakin memperburuk dunia pendidikan agama. Bahkan ke depan, pemerintah lebih memilih mahasiswa dari ilmu-ilmu non kependidikan, kemudian mahasiswa bersangkutan mengambil program akta IV atau pendidikan profesi.

Kelima, Masih diketemukannya proses rekrutmen guru PAI melalui jalur yang kurang prosedural. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahwa ada sejumlah proses pengangkatan guru melalui rekrutmen jalur belakang: kolusi, nepotisme. Padahal proses tersebut merupakan pengingkaran atas nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dan budaya masyarakat. Nabi menjelaskan, La'natullah 'alarrasyi walmurtasyi. Kondisi ini setidaknya mencerminkan tidak dimilikinya kepribadian yang luhur. Padahal dalam perspektif Mukhtar Yahya ada sejumlah sifat-sifat sebagai prasyarat bagi seorang

guru, yaitu dimilikinya sifat *aqliyyah* (intelektualitas), *jasmaniyyah* (fisik) dan *akhlaqiyyah* (moral). Dan orang yang melakukan nepotisme, kolusi adalah cermin tidak dimilikinya sifat *akhlaqiyyah*.

Dari paparan di atas, muncul paradoks, yaitu, di satu sisi, secara teoritis, pendidikan merupakan media strategis bagi proses transfer pengetahuan, nilai bahkan ideologi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi disisi lain muncul beberapa problem yang mengimbas terhadap ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem persekolahan sehingga banyak menelurkan jargon-jargon Emoh Sekolah, Sekolah itu candu dan jargon semacamnya, Ketidakpercayaan masyarakat merupakan imbas lain dari masih maraknya berbagai problem sosial yang terkadang anak-anak sekolah menjadi aktor utama dalam problem tersebut. Narkoba, hubungan di luar nikah, prostitusi anak sekolah adalah contoh paling nyata problem-problem dimaksud. Meski begitu dengan segala kekurangan yang dimiliki, tidak dapat dipungkiri bahwa belum diketemukannya media lain yang mampu menggantikan posisi sekolah. Sehingga sekolah masih merupakan "institusi wajib" bagi proses transfer pengetahuan, nilai dan sebagainya. Bagaimana dengan Pendidikan agama. Dalam banyak kasus masih diketemukan belum maksimalnya peran pendidikan agama sebagai jawaban atas problem-problem tersebut. Pendidikan agama masih diyakini kurang memiliki peran secara signifikan. Pendidikan agama belum difungsikan dan berfungsi secara maksimal. Bahkan dalam banyak hal pendidikan agama menempati wilayah *peripheral* dalam percaturan mata pelajaran sekolah. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang hanya menjadikan 3 (tiga) mata pelajaran sebagai barometer keberhasilan siswa dalam ujian dan keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dan barometer itu hanya terpusat pada aspek

kognitif. Padahal sekian banyak rumusan pendidikan yang berupaya meraih aspek afeksi dan psikomotor menjadi tidak tersentuh sama sekali.

Integrasi nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pada tataran aplikasinya, pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari perkembangan kurikulum hingga implementasi dalam pembelajaran PAI. Pada setiap kurikulum memiliki struktur kurikulum yang didalamnya tercantum sejumlah mata pelajaran. Pada struktur kurikulum jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam Standar Isi meliputi lima kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) Kelompok mata pelajaran estetika, (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dalam implementasinya, kelompok mata pelajaran tersebut mewujud dalam struktur kurikulum. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Struktur SMP/MTs. Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan kurikulum tersebut akan tampak dalam struktur berikut.

Struktur Kurikulum SMP/MTs Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi

Komponen	Kelas dan Alokasi Kelas
----------	-------------------------

	VII	VIII	IX
I. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2	2
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
II. Muatan Lokal	2	2	2
III. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	32	32	32

Sementara struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah Berdasar Permenag Nomor 2 Tahun 2008 tentang SI dan SKL PAI dan Bahasa Arab di Madrasah adalah sebagai berikut:

Komponen	Kelas dan Alokasi Kelas		
	VI I	VII I	IX
I. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama Islam	2	2	2
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Aqidah Akhlak	2	2	2
c. Fikih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
e. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2

f. Bahasa Indonesia	2	2	2
g. Bahasa Arab	2	2	2
i. Matematika	4	4	4
j. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
k. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
l. Seni Budaya	2	2	2
m. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan kesehatan	2	2	2
n. Keterampilan/ TIK	2	2	2
II. Muatan Lokal	2	2	2
III. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	42	42	42

Dari struktur di atas jelaslah bahwasanya kearifan lokal dapat dimuat dalam kurikulum madrasah berupa muatan lokal (Nana Sudjana, 2005). Adapun muatan lokal ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung pada daerah masing-masing. Muatan lokal dirumuskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP, 2005) sebagai berikut. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat

menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal (BNSP, 2006).

Peneguhan muatan lokal dapat dilihat dalam Acuan Operasional Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Poin ke sepuluh Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan bahwa KTSP disusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Maksudnya adalah kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. Dalam kehidupan masyarakat Aceh tentunya kearifan lokal dalam kurikulum muatan lokal adalah budaya Aceh. Sebagai orang Aceh yang memiliki budaya lokal Aceh, maka setidaknya dapat dilihat dalam tindakan simbolis baik dalam tradisi (kebiasaan), agama (religi), seni (keindahan). Dalam tradisi dapat diketemukan semangat gotong-royong, tolong menolong, adab yang diusung anak muda kepada yang lebih tua, silaturahmi, memberi teladan, musyawarah, sedekah, menghormati orang yang telah meninggal, kenduri, tradisi meugang dalam menyambut bulan Ramadhan dan dua hari raya dan sebagainya.

Nilai-nilai Budaya lokal tersebut, dalam perspektif pembelajaran semestinya tidak dipahami sebagai bertentangan dengan agama. Tetapi dijadikan sebagai media menggali nilai-nilai luhur yang dapat ditransformasikan kepada peserta didik. Jika kemudian memunculkan paradoks dengan nilai-nilai agama Islam, maka harus dijadikan argumen penjelas sehingga siswa dapat pengapresiasinya secara ilmiah dan tidak terjebak dalam pemahaman hitam-putih,

halal-haram, bid'ah-sunnah dan seterusnya. Apresiasi tersebut menemukan justifikasinya ketika dirujuk pada Panduan Penyusunan KTSP BNSP. Dalam diktum agama yang merupakan salah satu hal-hal yang harus diperhatikan dalam Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditegaskan, bahwa "Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

Dalam prakteknya, strategi pelaksanaan muatan lokal dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan monolitik, pendekatan integrasi dan pendekatan ekologis. Pemakaian pendekatan monolitik berimplikasi terhadap ketersediaan waktu khusus dalam kurikulum. Jika, pendekatan ini yang dipakai, maka muncullah nama mata pelajaran baru sebagaimana dikehendaki dalam panduan penyusunan KTSP. Menurut BSNP kurikulum muatan lokal memiliki bobot setara dengan 2 (dua) jam perminggu. Pendekatan Integrasi dimaksudkan pembelajaran muatan lokal diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Atau mata pelajaran muatan lokal diberikan secara bersama dengan mata pelajaran lain. Sehingga Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar terintegrasi dalam mata pelajaran lain, Sehingga muatan lokal menjadi suplemen terhadap mata pelajaran tersebut. Pendekatan ini dipergunakan jika materi muatan lokal berupa konsep atau prinsip yang sudah ada dalam mata pelajaran tertentu.

Sedang pendekatan ekologis dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran materi muatan lokal dengan menggunakan lingkungan alam maupun sosial budaya setempat. Dalam pendekatan ini kondisi alam

maupun sosial budaya dipelajari oleh peserta didik secara langsung. Secara praktis, jika dihubungkan dengan Pendidikan Agama Islam, maka dapat disusun program pembelajaran dengan mempergunakan dua pendekatan terakhir, yaitu integrasi dan ekologis. Proses pendekatan ini berhubungan dengan tingkatan pengalaman belajar manusia. Tingkatan belajar manusia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pengalaman Nyata (Pengalaman dengan benda nyata), Pengganti Pengalaman Nyata (Benda atau media penampil benda nyata), dan Pengalaman dengan kata-kata /verbal. Tingkatan ini memberikan pengaruh dalam proses belajar mengajar. Secara praktis, pendidik dihadapkan kepada permasalahan bagaimana melakukan proses belajar mengajar yang dapat memberikan efek positif bagi peserta didik.

Dengan kedua pendekatan tersebut, akan ditemukan dua fungsi, yaitu disatu sisi pembelajaran dapat memanfaatkan lingkungan sebagai upaya memberikan pengalaman nyata bagi siswa dan di sisi lain dapat mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh (baca: konsep sebagai ranah kognitif) dengan pengalaman nyata. Pengalaman nyata akan memberikan kesan yang lebih mendalam terhadap peserta didik daripada pengganti pengalaman nyata apalagi pengalaman dengan kata-kata verbal. Pengalaman nyata akan memberikan efek, seperti kegiatan pembelajaran lebih menarik sehingga merangsang tumbuhnya motivasi. Hakekat belajar lebih bermakna karena siswa dihadapkan langsung dengan kenyataan. Bahan-bahan yang dipelajari lebih kaya dan beraneka ragam serta lebih faktual. Pembelajaran lebih aktif sebab siswa langsung mempraktekannya. Siswa lebih memahami hakekat hidup yang ada dilingkungan sehingga tidak terasing dengan lingkungannya.

Namun dalam prakteknya, ada sejumlah metode yang dapat dipergunakan

dalam pemanfaatan lingkungan. Metode dimaksud adalah survei, karyawisata, praktek lapangan, berkemah, dan proyek pelayanan atau pengabdian. Survei dilakukan dengan cara peserta didik diajak mengunjungi lingkungan masyarakat setempat untuk mempelajari proses sosial. Kegiatan belajar dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Karyawisata dilakukan dengan cara peserta didik keluar kelas untuk mempelajari obyek tertentu di tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan topik pembelajaran sehingga memiliki dim makna sekaligus, yaitu edukatif dan rekreatif. Praktek Lapangan dilakukan dengan cara peserta didik melakukan praktek ditempat tertentu yang berhubungan dengan ketrampilan/kecakapan. Berkemah/out bond dilakukan dengan cara peserta didik diajak masuk ke lingkungan alam atau lingkungan buatan tertentu untuk mempelajari suasana alam atau lingkungan buatan dengan cara merekam berbagai kondisi yang berada di dalamnya disertai aktivitas edukatif. Sedang Proyek Pelayanan/Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan melakukan: aktivitas pelayanan masyarakat (penyuluhan, KKN, pemberian bantuan) sebagai implementasi pengetahuan yang dimiliki sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Nana Sudjana dan Ahmah Rifa'I, 2002).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penanaman nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi-materi PAI dan mata pelajaran lainnya dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya dengan mencantumkan muatan lokal pada kurikulum berdasarkan kebudayaan setempat. Dalam hal ini Aceh merupakan satu-satunya daerah yang memberlakukan syariat Islam sudah semestinya memasukkan kurikulum muatan lokal yang mengarah kepada budaya Aceh yang bercirikan syariat Islam. Saat ini pelajaran Bahasa Aceh merupakan salah satu muatan lokal

disamping juga muatan lokal lainnya seperti pembelajaran akidah akhlak dan etika, kesenian Aceh termasuk di dalamnya “*peurateb Aneuk*, *pantun*, *hadih maja* dan hikayat Aceh. Sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan lokal dapat dijadikan sebagai khazanah lokal dalam kurikulum pembelajaran PAI. Dengan pencantuman budaya sebagai muatan lokal setidaknya memiliki fungsi sebagai manifestasi tuntutan acuan pengembangan kurikulum sekolah sehingga mampu mengeliminir Pendidikan Agama dalam Pendidikan dan sebagai upaya mengeliminir gagap budaya yang banyak menghinggapi peserta didik, sehingga mereka mencari kompensasi pada budaya lain yang dalam banyak hal memiliki resistensi terhadap nilai-nilai agama. Muatan lokal yang dimaksud telah menjadi bagian dari kurikulum berdasarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah sebagai upaya meningkatkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- BNSP (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Departemen Agama RI (2005). *Pedoman Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Umum*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Dapendais).
- Muhaimin (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nana Sudjana dan Ahmad Rifa'I (2002). *Media Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2006). *Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasiwan dkk (2012). *Dari Kampus UNY untuk Indonesia Baru*, Yogyakarta: Penerbit ARTI.
- Oemar Hamalik (2007). *Managemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Ridwan N.A (2007). *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, Jurnal IBDA, Vol. 5, No. 1, Purwokerto, P3M STAIN Purwokerto.
- Sofian Amri dan Iif Khoiru Ahmadi (2009), *Konstruksi Pengembangan Pembelajaran: Pengaruhnya Terhadap Mekanisme dan Praktik Kurikulum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Suhartini (2009). *Proseding Seminar Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*, Yogyakarta.
- Synder, H. (2019). Literature review as a research methology: an overvie and guidelines. *Jurnal of Business Research*.
- Wina Sanjaya (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktik Kurikulum KTSP)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Zed, M. (1999). *Metodologi Sejarah*. FIS UNP.